

---

## **Kontribusi Negara dan Masyarakat dalam Proses Demokratisasi di Indonesia**

**Bayu Karunia Putra**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

bayukaruniaputra7@gmail.com

### **ABSTRAK**

Hak dan kewajiban adalah suatu elemen yang penting untuk tetap dijaga dan dirawat dengan baik oleh bangsa Indonesia saat ini. Dikarenakan, terkait konteksnya pada kewarganegaraan, hak dan kewajiban menjadi nilai dasar yang wajib ada bagi setiap warga negara untuk membangun sebuah negara dan masyarakat yang baik pada nantinya. Karena, perkembangan negara dan masyarakat di Indonesia saat ini telah memunculkan berbagai bentuk persoalan yang wajib untuk dijawab secara bersama terkait dengan keterlibatan negara dan masyarakat, khususnya dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia. Selain itu juga, dengan adanya demokratisasi dapat menciptakan kehidupan yang harmonis untuk kedepannya nanti. Dengan demikian bahwa, melalui adanya proses menuju demokratisasi dapat memberikan dampak yang positif dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan negara dan masyarakat sipil dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan seperti, yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literature, di mana sumber dan data diperoleh secara langsung melalui jurnal, buku, dan sumber tertulis yang lainnya. Hasil penelitian ini, keterlibatan negara dan masyarakat sipil dalam proses menuju demokratisasi telah berjalan membaik di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Indonesia, Demokratisasi, Masyarakat Sipil, Negara

### **PENDAHULUAN**

Keterlibatan negara dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang harus untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, keikutsertaan peranan secara langsung dari masyarakat sipil (civil society) dalam halnya terkait dengan keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia tidak perlu untuk diragukan lagi. Dikarenakan, dua elemen ini menjadi landasan yang sangat kuat dan kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lupa juga, dengan adanya kehadiran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menyatakan bahwa, akan pentingnya suatu peningkatan dari adanya peranan yang datang secara langsung oleh masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di negara Indonesia. Karena, dua elemen ini memiliki peran yang cenderung lebih kuat dalam mengimbangi sistem demokrasi kita saat ini.

Salah satu caranya adalah dengan melalui berbagai bentuk upaya negara dalam mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang lebih responsif dengan tetap menanamkan nilai demokratis yang tinggi dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga, sebagian banyak gerakan sosial yang menyerukan partisipasi warga negara yang lebih langsung pada proses politik yang telah muncul di beberapa negara yang ada di dunia (Correa-Lopera, 2019). Maka, peran demokrasi langsung akan lebih baik, jika yang pertama harus lebih memprioritaskan pada mayoritas pemilih yang memiliki sifat pragmatis dan kedua ialah masyarakat yang telah terpolarisasi secara ideologis. Dengan demikian bahwa, demokrasi langsung dapat di artikan sebagai suatu instrumen pilihan yang bersifat kolektif di Indonesia, di mana mayoritas pemilih memiliki

ideologi yang sama (Zaini, 2019). Oleh karena itu, terdapat tiga pola dasar demokrasi yang berkaitan secara langsung pada orientasi politik, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Berorientasi langsung dalam mengabaikan hak dan kepentingan minoritas.
2. Konvensional dengan memiliki pemahaman akan sempitnya terkait dengan kebebasan sipil.
3. Liberal dalam mendukung hak-hak minoritas dan kebebasan sipil.

Dari jumlah tersebut, maka pola pandangan liberal telah di anggap yang paling tidak stabil dari waktu ke waktu dan tingkat stabilitasnya, jika di kaitkan dengan kepercayaan institusional dan partisipasi publik (Serek & Lomicova, 2020). Ketika, halnya saat mempertimbangkan fitur struktur politik bahwa, demokrasi menghasilkan banyak sekali dampak positif yang sangat kuat dalam jangka waktu yang cukup panjang (Elbahnasawy, 2020). Dikarenakan, selayaknya dari seorang pembuat kebijakan pada umumnya sangat percaya bahwa, intervensi sipil dapat meningkatkan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian bahwa, terdapat hal-hal positif dari demokrasi untuk meningkatkan sistem politik yang lebih responsif, akuntabel, dan transparan yang menjadi salah satu dasar dalam intervensi bagi negara dan masyarakat sipil untuk kedepannya nanti (John & Sjoberg, 2020). Maka, sikap dari masyarakat, khususnya hal itu dalam menjalankan demokrasi harus senantiasa dapat tercerminkan dari adanya pengetahuan warga negara dan perilaku pemilihan umum (pemilu) yang pada tentunya yang sangat mempengaruhi partisipasi politik (Stutzer et al., 2019).

Karena, dalam proses demokrasi akan tetap menghasilkan sebuah informasi yang berbau politik yang dapat mengorganisir negara dan masyarakat sipil untuk senantiasa dapat membahas berbagai isu-isu sosial dan politik yang pada nantinya dapat memperkuat partisipasi demokrasi untuk kedepannya nanti. Maka, kualitas demokrasi yang secara umum dapat dilihat secara objektif dari pandangan ekonomi dalam mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kualitas demokrasi tersebut (Christmann, 2018). Selain itu juga, evaluasi dalam proses menuju demokratisasi di negara Indonesia dapat diukur dengan melalui adanya sebuah kebijakan dan administrasi publik. Pada akhirnya bahwa, demokrasi dalam kaitannya dengan aspek-aspek akuntabilitas, transparansi, dan bertanggung jawab menjadi salah satu ciri ke dalam sistem politik yang mencakup secara keseluruhan, akan tetapi juga masuk ke dalam ranah bagaimana cara organisasi publik dapat dikelola dengan baik pada nantinya (Sager, 2018). Dengan demikian bahwa, masyarakat saat ini sangat meyakini terkait dengan kontribusi kelembagaan dalam aspek-aspek lembaga publik melalui adanya regulasi yang di jadikan sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan transparan dalam demokrasi saat ini (Gallier, 2020).

Selain itu juga, dalam penguatan demokrasi nasional dalam suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan demokrasi lokal yang ada di sana. Dikarenakan, dalam mencapai hal tersebut bahwa, aspek-aspek yang terpenting yang harus tetap ada, yaitu perilaku politik, cara hidup, dan memerlukan dukungan dari setiap individu dalam masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terbesar (Rahmatulloh, 2013). Dengan demikian bahwa, negara dan masyarakat sipil memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan selayaknya sebagai suatu konektivitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya (tupoksi) yang sesuai dengan keadaan saat ini. Karena, dengan demikian tentunya memiliki suatu perbedaan, jika dibandingkan dengan militer yang harus ditaati (Sandy, 2018). Maka, dalam kaitannya dengan aspek-aspek demokrasi dalam upaya penguatan untuk menekankan pada berbagai aspek-aspek penting yang ada di dalamnya tentunya seperti, pengetahuan, perilaku, dan peran kebijakan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian bahwa, demokrasi di jadikan sebagai sebuah konsep yang memiliki sistem pemerintahan yang telah diadopsi oleh negara Indonesia di sejak awal berdirinya bangsa

ini. Selain itu juga, demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem politik pertama yang dipilih secara langsung oleh negara Indonesia sebagai salah satu jalan untuk membangun negara. Maka, konsep negara dan masyarakat sipil (civil society) yang dalam hal ini selalu melandasi mengenai konsep tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prosesnya yang merujuk pada mandiri ataupun otonom, yaitu sebagai salah satu entitas yang kuat untuk mampu memajukan diri sendiri, dapat membatasi segala bentuk intervensi pemerintahan dan negara dalam realita yang diciptakannya, dan mampu untuk memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan saat ini. Secara operasional bahwa, terkait halnya pada masyarakat sipil (civil society) yang dimaksud dapat mencakup dalam berbagai macam institusi-institusi non pemerintah yang berada dalam lingkup masyarakat yang selalu mewujudkan diri melalui adanya mekanisme organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial, dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti, organisasi sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan lain sebagainya, yang bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonomi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa, sistem demokrasi telah mengharuskan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

Akan tetapi, permasalahan yang sering terjadi saat ini terkait dengan perkembangan dalam konteksnya pada praktek demokratisasi seiring dengan bertambahnya pengalaman pada demokrasi di negara Indonesia dari masa ke masa masih terdapat berbagai kesenjangan, kemiskinan, kelaparan, dan permasalahan kesehatan yang tidak kunjung selesai ditengah merebaknya masyarakat saat ini (Alfitri, 2009). Maka, urgensi dalam hal ini, sangat dibutuhkan sekali sebuah korelasi yang sangat kuat di antara demokrasi dan masyarakat sipil (civil society) yang sebagaimana telah ditunjukkan oleh (Mas'ood, 2002) yang mengatakan bahwa, demokrasi sendiri tidak akan bisa ditegakkan, bilamana itu tidak mendapatkan dukungan ataupun tidak di dukung secara langsung oleh kekuatan "civil society" dan "civil society" akan menjadi berantakan, jika demokrasi itu tidak segera diwujudkan dengan baik pada nantinya. Dengan demikian bahwa, demokrasi akan mampu ditegakkan dengan adanya dukungan yang kuat yang datang langsung dari negara dan masyarakat sipil (civil society) itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa, demokrasi akan senantiasa selalu untuk membutuhkan seorang aktor yang datang secara langsung dari negara dan masyarakat sipil (civil society) tersebut. Demikian melalui adanya penjelasan ini bahwa, maka dengan adanya keberadaan dari negara yang disertai dengan masyarakat sipil (civil society) sangat diperlukan dalam membangun sistem politik yang bernuansa langsung dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikarenakan, hal ini telah sebagaimana termuat dalam sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, Indonesia sejak merdeka mencanangkan demokratisasi tersebut. Demokratisasi ini menjadi salah satu landasan pokok yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena, dalam proses demokratisasi ini menjadi suatu proses yang di mana sistem pemerintahan itu harus memiliki keseimbangan antara semua elemen-elemen yang terkait dan tidak sepihak kepada siapapun itu, maka demokrasi ini lebih dikenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ditambah, dengan adanya proses demokratisasi ini pada nantinya akan tercipta sebuah mekanisme yang menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Karena, antara Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 ini menjadi salah satu amanah yang harus dijalankan oleh negara Indonesia yang sebagaimana telah diamanahkan pada sebelumnya.

Sebab, kedua elemen ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan demokratisasi di negara Indonesia untuk kedepannya nanti. Dengan demikian bahwa, bangsa Indonesia harus berupaya semaksimal mungkin dalam memproses demokratisasi itu dengan sebaik-baiknya pada nantinya. Maka, dengan kehadiran dari suatu negara dan masyarakat sipil

(civil society) yang nantinya dalam ikut serta untuk mengambil bagian dalam mewujudkan demokrasi itu yang jauh lebih baik lagi. Karena, dengan adanya mereka senantiasa dapat membantu mewujudkan demokratisasi yang sebenar-benarnya. Selain itu juga, dengan adanya proses demokratisasi ini yang pada nantinya dapat menciptakan bangsa Indonesia yang semakin maju untuk kedepannya nanti.

Dikarenakan, seperti yang kita lihat bahwa, dalam bangsa Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan semua elemen-elemen publik (masyarakat). Dalam artian bahwa, dalam proses demokrasi di negara Indonesia masih belum mencapai titik kesempurnaan dan masih sangat jauh dari ekspektasi (harapan) semua kalangan, khususnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia harus senantiasa memiliki dampak yang positif dalam kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memunculkan berbagai bentuk upaya-upaya yang dilakukan pada nantinya. Maka, seperti dapat dilihat saat ini bahwa, demokrasi di negara Indonesia dikenal sebagai sebutan demokrasi Pancasila, yaitu paham demokrasi yang bersumber secara langsung kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia dengan tetap perwujudan atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agar pada nantinya dapat mewujudkan negara Indonesia yang dapat mencapai titik kesempurnaan untuk kedepannya nanti. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan negara dan masyarakat sipil dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia, apakah sudah berjalan yang sesuai dengan harapan seperti, yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Negara**

Negara diartikan sebagai organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur terkait hubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara memiliki kewajiban atau keharusan untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga, negara berfokus juga kepada kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan langsung dibawah naungan lembaga politik/pemerintah yang efektif maupun efisien, mempunyai kesatuan politik, dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Maka, tujuan dari negara itu yang pastinya sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk dapat mengejar ataupun menempuh beberapa tujuan bersama yang telah ditetapkan sejak awal. Oleh karena itu, fungsi dari negara itu sebagai layaknya seperti, untuk pertahanan maupun keamanan, keadilan, pengaturan/keadilan, dan kesejahteraan maupun kemakmuran.

### **Masyarakat Sipil**

Masyarakat sipil adalah suatu arena yang berada diluar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang yang memiliki kelompok dapat mendorong kepentingan kebersamaan. Di sisi lain juga, masyarakat sipil ini menjadi ruang yang terletak antara negara di satu sisi masyarakat di satu sisi yang lainnya. Maka, dengan terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak hanya sekedar tergantung kepada negara yang dapat mengatur dengan baik, akan tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil (civil society) yang telah memfasilitasi interaksi sosial, politik, dan memobilisasi berbagai bentuk kelompok dalam masyarakat untuk terlibat. Selain itu juga, masyarakat sipil (civil society) seakan-akan menjadi tatanan sosial yang subur dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip moral untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Maka, masyarakat sipil (civil society) ditandai dengan adanya penekanan pada ruang, di mana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya dalam semangat toleransi di suatu wilayah negara.

**Demokratisasi**

Demokratisasi merupakan salah satu proses transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis, terutama perubahan politik substansif yang bergerak ke arah demokrasi. Dikarenakan, terjadinya peningkatan atas minat dalam proses demokratisasi di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis pendidik yang disebabkan oleh adanya penguatan norma-norma yang mengaitkan demokrasi yang banyak menghasilkan hal-hal yang berbau positif seperti, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kemakmuran ekonomi, dan keamanan. Maka, tren demokratisasi dapat dilihat dari adanya transisi menuju demokrasi yang cenderung terjadi secara global dan bergelombang, artinya telah mencapai ruang dan waktu, bukan melainkan terdistribusi secara acak. Dengan demikian bahwa, pendekatan utama dalam menjelaskan demokratisasi melalui penekanan terhadap kondisi struktural yang menguntungkan dan penekanan terhadap pilihan elit. Oleh karena itu, demokratisasi ini menjadi sangat penting, karena demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana metode ini digunakan dengan cara memanfaatkan langsung dari adanya data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh secara langsung dari sebuah referensi seperti, jurnal, buku, dan sumber tertulis yang lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memakai teknik studi literature atau kepustakaan yang langsung digunakan oleh peneliti untuk dapat menghimpun, menggali, dan mengumpulkan berbagai bentuk informasi secara valid, lengkap, dan relevan terkait dengan topik masalah yang akan menjadi objek penelitian yang telah diangkat sebelumnya. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis studi literature, di mana studi ini dilakukan dengan membaca berbagai macam sumber-sumber kepustakaan yang telah ada untuk memperoleh data yang diperlukan dengan langkah-langkah pada (Nazir, 2014) dan (Arikunto, 2013), yakni antara lain sebagai berikut:

1. Membaca segala bentuk keterangan yang ada dalam penelitian, apakah telah tersedia terkait dengan keterangan-keterangan yang sesuai dengan latar belakang permasalahan penelitian yang akan dikaji ataupun diteliti (Nazir, 2014).
2. Mengumpulkan berbagai bentuk sumber bahan kajian yang telah relevan dengan masalah dalam penelitian (Arikunto, 2013).
3. Mengutip informasi yang ada pada bacaan tersebut dengan menggunakan metode seperti, kutasi (mengutip secara langsung), paraphrase (menggunakan kata-kata sendiri) (Nazir, 2014) dan menuliskan hasil kajian ke dalam kartu yang telah disediakan pada sebelumnya (Arikunto, 2013).
4. Mencatat hal-hal yang penting dengan melihat terlebih dahulu, mana yang penting dengan juga mempelajari indeks di halaman belakang buku untuk mencari halaman yang berkenaan langsung dengan apa yang telah dicatat dalam kartu yang telah disediakan (Nazir, 2014).
5. Menyimpulkan hasil yang telah diperoleh (Arikunto, 2013).
6. Melakukan interpretasi atas hasil yang diperoleh pada sebelumnya (Nazir, 2014).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berangkat dari adanya keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri. Karena, dari kedua elemen ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat bagi berlangsungnya demokratisasi di negara Indonesia. Apalagi, ditambah dengan adanya demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang harus untuk selalu dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Ditambah, dengan adanya keberadaan dari demokrasi ini



dijadikan sebagai salah satu sistem pemerintahan yang telah diadopsi oleh bangsa Indonesia sejak awal berdirinya bangsa ini. Maka, peranan dari negara dan sekaligus masyarakat sipil (civil society) ini begitu penting dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia pada saat ini.

Dikarenakan, untuk mencapai hal itu bahwa, aspek-aspek yang terpenting tetap harus ada seperti, perilaku politik, cara hidup, dan memerlukan dukungan dari setiap individu yang datang secara langsung dalam diri masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terbesar (Rahmatulloh, 2013). Karena, dengan demikian tentunya hal ini memiliki suatu perbedaan, jika dibandingkan dengan militer yang harus tetap ditaati (Sandy, 2018). Dengan demikian bahwa, demokrasi dijadikan sebagai salah satu konsep yang memiliki mekanisme terkait dengan sistem pemerintahan yang telah diadopsi secara langsung oleh negara Indonesia dari awal berdirinya bangsa ini. Selain itu juga, demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem politik pertama yang dipilih langsung oleh negara Indonesia sebagai salah satu jalan dalam mencapai tujuan untuk membangun sebuah negara. Selanjutnya, terkait dengan konsep negara dan masyarakat sipil (civil society) yang dalam hal ini dengan tetap melandasi terkait dengan konsep mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prosesnya pada segi otonom, yaitu sebagai sebuah entitas yang cukup kuat untuk dapat memajukan diri sendiri, mampu membatasi segala bentuk intervensi pemerintahan maupun negara dalam realitas yang telah diciptakannya, dan mampu untuk memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan yang ada saat ini.

Maka, dalam hal ini yang terkait dengan sistem demokrasi yang sangat mengharuskan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Dikarenakan, ketika demokrasi akan mampu ditegakkan dengan adanya dukungan yang kuat yang datang secara langsung dari sebuah negara dan masyarakat sipil (civil society) itu sendiri. Maka, hal ini mengisyaratkan bahwa, demokrasi akan senantiasa selalu untuk membutuhkan seorang aktor yang datang secara langsung dari negara dan masyarakat sipil (civil society) tersebut. Karena, hal ini telah sebagaimana ada yang termuat dalam sebuah konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa, Indonesia sejak merdeka mencanangkan untuk melakukan demokratisasi tersebut. Maka, dibawah ini akan dibahas terkait dengan konsep negara dan masyarakat sipil, akselerasi dalam proses menuju demokratisasi, serta peran negara dan masyarakat sipil dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia, yakni antara lain sebagai berikut:

### **Konsep Negara dan Masyarakat Sipil**

Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan atas dasar untuk mengatur perihal yang berhubungan secara langsung dengan kepentingan masyarakat dalam cakupan yang sangat luas. Di sisi lain bahwa, ada yang mengartikan negara sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sesuatu wilayah yang dapat memaksakan kehendak kekuasaannya secara sah maupun mutlak terhadap semua golongan kekuasaan yang lainnya dan dapat menetapkan berbagai bentuk tujuan-tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsepsi negara bahwasanya, negara menetapkan cara-cara dan batas-batas, di mana kekuasaan itu dapat halnya digunakan untuk kehidupan bersama, baik itu berupa kehidupan yang datang secara langsung dari individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Selain itu juga, negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya itu, negara menjadi salah satu kelompok sosial yang tetap menduduki dalam ruang rumpun wilayah ataupun daerah tertentu yang telah sebagaimana diorganisasikan dibawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, dan berdaulat, sehingga berhak dalam menentukan tujuan nasionalnya yang telah ditetapkan pada sebelumnya.

Menurut Miriam Budiardjo (2010) yang menyatakan bahwa, negara dapat dipandang sebagai sebuah asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar berbagai bentuk tujuan bersama. Maka, dapat dikatakan bahwa, tujuan akhir dari setiap negara yang pastinya adalah menciptakan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Sedangkan, jika kita melihat tujuan

negara Indonesia yang telah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat, maka tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam fungsi dari negara, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan
2. Fungsi Keadilan
3. Fungsi Pengaturan dan Keadilan
4. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran

Selain itu juga, terdapat berbagai unsur-unsur dari negara, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Penduduk
2. Warga Negara
3. Wilayah
4. Pemerintah
5. Kedaulatan
6. Pengakuan dari Negara Lain

Selanjutnya, dalam konteks masyarakat sipil yang dikatakan sebagai suatu arena yang dijadikan tempat dalam berbagai gerakan sosial, serta organisasi sipil dari semua kelas yang tetap berusaha untuk menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan, sehingga dapat mengekspresikan diri dan memajukan dalam berbagai kepentingan. Maka, karakteristik dari masyarakat sipil (civil society) ini menjadi masyarakat yang majemuk yang telah berkembang untuk tetap mengedepankan sikap saling toleransi atau saling menghargai antara satu dengan yang lainnya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, hukum, dan pluralisme, sehingga pada nantinya mereka memiliki kemajuan secara signifikan. Oleh karena itu, masyarakat sipil (civil society) menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Maka dari itu, dari kedua elemen ini yang pada nantinya akan membentuk demokratisasi di Indonesia semakin membaik untuk kedepannya nanti.

### **Akselerasi dalam Proses Menuju Demokratisasi**

Terkait dengan terjadinya akselerasi dalam proses menuju demokratisasi di suatu negara membutuhkan sebuah kondisi yang kondusif. Dikarenakan, ada sejumlah hal yang dapat menjadi pra kondisi bagi terciptanya akselerasi demokratisasi dalam suatu negara. Selain itu juga, ada yang memiliki anggapan bahwa, setiap faktor ekonomi merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya proses demokratisasi di suatu negara. Disisi lain juga, masyarakat industri modern yang diasumsikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang cukup tinggi akan lebih mudah menciptakan suatu negara yang demokratis. Asumsi itu didukung secara langsung oleh pernyataan seorang ahli politik yang bernama Seymour M. Lipset yang mengatakan bahwa, semakin kaya suatu bangsa, maka akan semakin besar peluang negara itu untuk melangsungkan proses demokrasi (Sorensen, 1993).

Pendapat Lipset ini didukung dengan disertai adanya kenyataan yang menyatakan bahwa, modernisasi dan kesejahteraan akan tetap disertai dengan adanya sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi, yaitu meningkatnya tingkat melek huruf maupun tingkat pendidikan, urbanisasi, dan pembangunan media massa. Dengan demikian bahwa, kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga akan menyediakan berbagai bentuk sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh adanya konflik politik. Pernyataan Lipset itu juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang pengamat politik yang lainnya, yaitu Robert Dahl, yang mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi sebuah negara akan semakin mungkin bagi masyarakat untuk menjadi

demokratis. Namun, pendapat dan argumen yang dilontarkan oleh Lipset dan Robert Dahl itu terbantahkan oleh adanya kenyataan empiris yang terjadi di sejumlah negara. Sebagai contohnya bahwa, di negara Argentina pernah terjadi praktek politik otoritarianisme selama bertahun-tahun, padahal tingkat pendapatan perkapita rakyatnya relatif cukup tinggi, ditambah bangsa ini pada saat itu cukup makmur secara ekonomi.

Demikian pula juga, kasus yang sama terjadi di negara Taiwan dan Korea Selatan. Bahkan, pada kasus yang terjadi di Korea Selatan dalam pembangunan ekonomi yang cepat, disertai dengan distribusi pendapatan yang cukup merata, namun hal itu tidak disertai dengan adanya korelasi yang paralel dengan berlangsungnya praktek akselerasi demokratisasi. Jadi, menurut pengamatan beberapa ilmuwan politik bahwa, kemakmuran suatu masyarakat dan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa tidak dapat menjadi jaminan yang bersifat absolut akan terjadinya pelaksanaan konsep demokrasi di nberbagai egara-negara ekonomi maju tersebut. Pendapat lain juga mengatakan bahwa, akselerasi demokratisasi di suatu negara disebabkan oleh adanya pra kondisi yang berupa budaya politik dari suatu bangsa. Menurut asumsi ini, maka lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa, sistem nilai dan keyakinan akan menjelaskan konteks dan makna dari tindakan politik.

Namun, dalam kasus ini memunculkan suatu pertanyaan baru, bilamana sbudaya politik berhubungan secara langsung dengan adanya sistem budaya yang lebih luas dalam masyarakat, karena sangat mungkingah diidentifikasi akan menjadi nilai dan keyakinan budaya yang kondusif bagi jalannya demokrasi. Maka, salah satu jawaban yang muncul dari pertanyaan itu adalah apa yang terjadi pada gerakan Protestantisme. Dikarenakan, ideologi Protestantisme mendukung terjadinya proses dalam praktek demokrasi di suatu negara, akan tetapi bagi ideologi yang lain, yaitu Katolisisme dalam banyak kasus, terutama di Amerika Latin justru menghambat proses demokrasi dalam pengertian yang cukup luas, maka sejumlah budaya lebih menekankan pada hierarki, otoritas, dan intoleransi dibandingkan budaya yang lainnya. Disisi lain juga, dapat dikatakan bahwa, budaya-budaya itu kurang kondusif bagi pelaksanaan demokratisasi di suatu negara, termasuk dalam hal ini adalah Islam dan Konfusionisme (Sorensen, 1993). Namun, dengan demikian memang diakui langsung oleh banyak ahli bahwa, sulit untuk melihat suatu hubungan yang sistematis dan pasti antara pola budaya tertentu dan privalensi demokrasi, maka ada saja hal-hal yang bersifat relatif.

Oleh karena itu, sistem budaya dapat diartikan sebagai subyek perubahan yang bersifat dinamis. Hal ini nampak pada ideologi Katolisisme, maka pada kurun waktu tertentu dalam perjalanan sejarah, ideologi ini menghambat demokrasi di Amerika Latin, akan tetapi pada sisi lain gereja Katolik juga memainkan peranan penting dan aktif dalam oposisinya terhadap pemerintah otoriter di tahun 1980-an. Demikian juga dengan ideologi Islam, di beberapa negara di Timur Tengah ideologi ini sangat mungkin menghambat dalam proses demokratisasi, namun di negara Indonesia pada masa reformasi ini, maka setiap kelompok-kelompok partai yang berspesifikasi pada ideologi Islam sangat mendukung pada terjadinya proses demokratisasi yang tengah berlangsung dengan marak di negara Indonesia. Selain itu juga, pra kondisi lain yang dianggap dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi tegaknya iklim demokrasi di sebuah negara, yaitu struktur sosial masyarakat. Maka, pra kondisi ini berupa faktor-faktor internal yang berupa sistem pelapisan sosial yang ada di masyarakat tersebut.

Dengan demikian bahwa, kelas sosial tertentu akan memberikan dukungan yang cukup signifikan bagi terjadinya proses demokratisasi, akan tetapi kelas sosial yang lainnya justru menentangnya. Namun dengan demikian, kita dihadapkan dengan adanya unsur relativitas yang ada di dalamnya. Karena, pada struktur kelas yang telah dianggap mendukung dalam proses menuju demokratisasi itu pada situasi dan kondisi lain yang berbeda ternyata adakalanya, justru menjadi salah satu faktor penghambat dalam terjadinya proses demokratisasi, demikian pula sebaliknya. Maka, kelas yang selama ini telah diposisikan sebagai faktor penghambat dalam proses demokratisasi pada situasi dan kondisi yang berbeda



mereka justru memberikan dukungan yang cukup besar bagi terciptanya iklim demokrasi. Hal ini dapat terlihat pada kajian historis yang dilakukan secara langsung oleh seorang pengamat politik Barrington Moore dalam bukunya Sorensen, Moore telah menyimpulkan bahwa, kaum borjuis dalam kadar tertentu bekerja untuk proses demokratisasi suatu bangsa, akan tetapi thesis Moore ini dibantah oleh pengamat politik yang lain, yaitu Goran Thurbon, menurut pendapat Thurbon, di banyak negara, demokratisasi muncul sebagai salah satu bentuk perjuangan masyarakat melawan dominasi dan hegemoni kaum borjuis.

Faktor lain yang dapat dijadikan modal bagi berlangsungnya iklim demokratis suatu masyarakat adalah faktor eksternal. Dikarenakan, kondisi ekonomi, politik, dan ideologi dalam hal skala global akan mempengaruhi praktek demokrasi di sebuah negara. Maka, menurut beberapa kalangan faktor eksternal ini akan dapat mempengaruhi tingkat percepatan akan kesadaran masyarakat, khususnya di berbagai negara-negara berkembang, karena akan pentingnya penerapan ideologi demokrasi dalam sistem politiknya. Pengamat modernisasi juga berpendapat bahwa, faktor-faktor eksternal itu akan dapat mempengaruhi bagi upaya pengembangan dan penguatan dalam penerapan doktrin demokrasi di berbagai negara-negara yang ada di dunia ketiga. Namun, pendapat inipun disangkal kebenarannya, teoritis dependensi menarik kesimpulan yang bertolak belakang.

Dengan demikian bahwa, ketimpangan dan distorsi ekonomi yang terjadi di masyarakat dunia ketiga telah disebabkan oleh adanya ketergantungan pada sistem ekonomi dunia. Karena, hal itu bisa saja menimbulkan suatu hal yang tidak baik yang pastinya. Maka, hal ini yang membuat dalam praktek demokratisasi di negara dunia ketiga sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, cukup sulit untuk merumuskan suatu model yang bersifat absolut untuk dapat dijadikan sebagai rujukan bagi terjadinya percepatan untuk pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Dikarenakan, pra kondisi yang tampaknya dilihat kondusif bagi implementasi ideologi demokrasi di suatu negara, akan tetapi ternyata di dalamnya juga terdapat berbagai macam hal-hal yang terlihat kontra produktif bagi berlakunya iklim demokrasi.

Namun dengan demikian, pengakuan terhadap pentingnya pra kondisi di atas bagi terlaksananya sebuah proses demokratisasi di suatu negara bukan suatu hal yang percuma. Setidaknya, pemahaman akan adanya pra kondisi di atas seperti, dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperjuangkan berlangsungnya suasana sistem politik yang demokratis dalam suatu negara. Namun demikian bahwa, para aktor politik juga tetap harus kritis untuk memperhatikan segala bentuk pra kondisi lain yang terjadi pada sebelumnya. Maka, pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak dapat terlepas dari adanya struktur dan pra kondisi yang merupakan salah satu hasil pembangunan dan aktivitas elit politik di masa lampau. Maka dari itu, kita harus melihat bahwa, terlaksananya atau tidak terlaksananya dalam proses menuju demokratisasi di suatu negara dapat dipengaruhi dan ada kaitannya dengan adanya pra kondisi terkait dengan ekonomi, sosial, dan budaya, yang telah terbentuk pada periode yang sebelumnya dan tentunya itu harus menjadi salah satu bahan untuk pertimbangan dan rujukan bagi para elit politik yang ada dalam suatu negara saat ini.

### **Peran Negara dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia**

Terkait dengan konteksnya pada keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang tetap untuk di jalankan maupun di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan, dua elemen ini menjadi suatu landasan yang sangat kuat, kokoh, dan tangguh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri. Karena, dua elemen ini juga memiliki peranan yang cenderung lebih kuat dalam mengimbangi dari adanya sistem demokrasi kita pada saat ini. Sebagai contoh bahwa, salah satu caranya adalah dengan melalui berbagai bentuk upaya yang di lakukan oleh negara dalam

mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang lebih responsif dengan tetap untuk menanamkan nilai-nilai yang bersifat demokratis yang sangat tinggi yang dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, telah muncul berbagai bentuk ataupun macam-macam gerakan sosial yang menyerukan pada setiap partisipasi warga negara yang secara langsung melalui adanya proses politik yang telah ada di berbagai negara yang ada di dunia (Correa-Lopera, 2019).

Dengan demikian bahwa, peranan dari adanya proses demokrasi langsung akan lebih baik, jika yang pertama harus lebih mengedepankan ataupun memprioritaskan pada setiap mayoritas pemilih yang memiliki sifat pragmatis dan kedua merupakan salah satu masyarakat yang telah terpolarisasi langsung secara ideologis. Maka, demokrasi langsung dapat di artikan sebagai suatu instrumen pilihan yang memiliki sifat kolektif di negara Indonesia, di mana mayoritas pemilih memiliki ideologi yang sama dengan ideologi yang lainnya (Zaini, 2019). Karena, kaitannya dalam bentuk jumlah bahwa, maka untuk pola pandangan liberal yang telah di anggap sebagai paling tidak stabil dari waktu ke waktu dan tingkat stabilitasnya, jika dikaitkan secara langsung dengan kepercayaan institusional dan partisipasi publik (Serek & Lomicova, 2020). Ditambah, ketika saat mempertimbangkan berbagai macam bentuk fitur dari adanya struktur politik bahwa, demokrasi telah menghasilkan banyak sekali dampak positif yang sangat kuat dalam kurun jangka waktu yang lumayan cukup panjang (Elbahnasawy, 2020). Apalagi, selayaknya dari seorang pembuat kebijakan yang pada umumnya sangat percaya akan adanya intervensi sipil yang dapat meningkatkan demokrasi dengan sebaik-baiknya pada nantinya.

Maka, seperti yang dapat di ketahui bahwa, dalam bangsa Indonesia yang ada pada saat ini masih belum sepenuhnya berjalan yang sesuai dengan ekspektasi (harapan) dari masing-masing semua elemen publik (masyarakat). Dalam artian bahwa, dalam proses demokrasi di negara Indonesia yang dapat terlihat masih belum sepenuhnya mencapai titik kesempurnaan dan masih sangat jauh dari harapan semua kalangan, khususnya bagi publik (masyarakat) itu sendiri. Dengan demikian bahwa, dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia harus senantiasa memiliki dampak yang positif bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dengan melalui cara memunculkan berbagai bentuk upaya-upaya yang dapat di lakukan pada nantinya. Maka, seperti yang dapat di lihat bersama bahwa, demokrasi di negara Indonesia dapat dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila, di mana seluruh paham demokrasi ini yang bersumber secara langsung pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia dengan perwujudan atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agar pada nantinya dapat mewujudkan negara Indonesia yang dapat mencapai titik kesempurnaan untuk kedepannya nanti. Maka dari itu, keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam proses menuju demokratisasi telah berjalan membaik di negara Indonesia pada saat ini.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteksnya pada keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang harus untuk di jalankan maupun di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan, dua elemen ini menjadi sebuah landasan yang sangat kuat, kokoh, dan tangguh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena, dua elemen ini juga memiliki peranan yang dominan lebih kuat dalam mengimbangi sistem demokrasi kita pada saat ini. Sebagai contoh bahwa, salah satu caranya adalah dengan melalui berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh negara dalam mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang lebih responsif dengan harus tetap menanamkan nilai-nilai demokratis yang tinggi dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, telah muncul berbagai macam gerakan sosial yang menyerukan kepada partisipasi

warga negara yang secara langsung melalui proses politik yang telah ada di beberapa negara yang ada di belahan dunia (Correa-Lopera, 2019).

Dengan demikian bahwa, peranan dari demokrasi langsung akan lebih baik, jika yang pertama harus lebih memprioritaskan pada setiap mayoritas pemilih yang memiliki sifat pragmatis dan kedua adalah masyarakat yang telah terpolarisasi secara ideologis. Maka, demokrasi langsung dapat diartikan sebagai suatu instrumen pilihan yang bersifat kolektif di negara Indonesia, di mana mayoritas setiap pemilih memiliki ideologi yang sama (Zaini, 2019). Kaitannya dalam bentuk jumlah bahwa, maka untuk pola pandangan liberal yang telah dianggap sebagai paling tidak stabil dari waktu ke waktu dan tingkat stabilitasnya, jika dikaitkan langsung dengan kepercayaan institusional dan partisipasi publik (Serek & Lomicova, 2020). Ketika dalam saat mempertimbangkan berbagai macam bentuk fitur struktur politik, maka demokrasi telah menghasilkan banyak dampak positif yang kuat dalam kurun jangka waktu yang lumayan cukup panjang (Elbahnasawy, 2020). Dikarenakan, selayaknya dari seorang pembuat kebijakan yang pada umumnya sangat percaya akan intervensi sipil yang dapat meningkatkan demokrasi dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian bahwa, ditemukan berbagai macam hal-hal yang positif dari adanya demokrasi untuk meningkatkan sistem politik yang lebih responsif, akuntabel, dan transparan yang menjadi salah satu landasan pokok dalam intervensi bagi negara dan masyarakat sipil (civil society) (John & Sjoberg, 2020). Maka, sikap yang harus tetap ada dari dalam diri masyarakat, khususnya dalam melakukan proses demokrasi harus tetap mencerminkan pengetahuan warga negara dan perilaku pemilihan umum yang tentu pada nantinya sangat mempengaruhi partisipasi politik itu sendiri. Karena, dalam proses demokrasi akan tetap menghasilkan suatu informasi yang dominan pada politik yang dapat mengorganisir setiap negara dan masyarakat sipil (civil society) untuk dapat membahas berbagai macam isu-isu sosial dan politik yang pada nantinya dapat memperkuat partisipasi demokrasi untuk kedepannya nanti. Oleh karena itu, kualitas demokrasi secara umum dapat dilihat melalui keobjektifan dari segi pandangan ekonomi dalam mempengaruhi setiap kepuasan masyarakat terhadap kualitas demokrasi tersebut. Selain itu juga, evaluasi dalam proses menuju demokratisasi di negara Indonesia senantiasa dapat diukur dengan melalui adanya sebuah kebijakan dan administrasi publik.

Pada akhirnya bahwa, dapat dilihat demokrasi dalam kaitannya dengan berbagai macam ataupun bentuk dari aspek-aspek akuntabilitas, transparansi, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi menjadi salah satu ciri di dalam sistem politik yang mencakup secara keseluruhan. Maka, masyarakat saat ini sangat meyakini bahwa, kontribusi kelembagaan dalam aspek-aspek lembaga publik melalui adanya regulasi adalah salah satu proses dalam pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan transparan dalam sistem demokrasi tersebut (Gallier, 2020). Selain itu juga, di sisi lain dalam penguatan demokrasi nasional ke dalam suatu negara sangat tergantung pada keberhasilan dalam segi demokrasi lokal yang ada disana. Dikarenakan, negara dan masyarakat sipil (civil society) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan selayaknya sebagai salah satu konektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan keadaan saat ini. Maka, dalam kaitannya dengan aspek-aspek demokrasi dalam mengupayakan berbagai macam ataupun bentuk penguatan dalam menekankan pada berbagai aspek yang penting yang harus tetap ada di dalamnya yang tentunya seperti, pengetahuan, perilaku, dan peran kebijakan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikarenakan, seperti yang dapat kita ketahui bersama bahwa, dalam bangsa Indonesia yang ada saat ini masih belum sepenuhnya berjalan yang sesuai dengan harapan semua kalangan masyarakat. Dalam artian bahwa, dalam proses demokrasi di negara Indonesia yang masih belum mencapai titik kesempurnaan dan masih sangat jauh dari harapan semua kalangan, khususnya bagi semua elemen masyarakat. Dengan demikian bahwa, dalam proses

menuju demokratisasi di Indonesia harus senantiasa memiliki dampak yang positif dalam kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memunculkan berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan pada nantinya. Maka, seperti yang dapat dilihat bersama bahwa, demokrasi di negara Indonesia dikenal sebagai sebutan demokrasi Pancasila, yaitu paham demokrasi yang bersumber secara langsung kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia dengan perwujudan atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agar pada nantinya dapat mewujudkan negara Indonesia yang dapat mencapai titik kesempurnaan pada nantinya. Maka dari itu, keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam proses menuju demokratisasi telah berjalan membaik di negara Indonesia pada saat ini.

## REFERENSI

- Alfitri, R. (2009). Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan atau Melahirkan Kesenjangan. *Jurnal PPKn Dan Hukum*, 4(1).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Christmann, P. (2018). Economic Performance, Quality of Democracy and Satisfaction with Democracy. *Electoral Studies*, 53, 79–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.04.004>
- Correa-Lopera, G. (2019). Demand of Direct Democracy. *European Journal of Political Economy*, 60(May). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.004>
- Elbahasaway, N. G. (2020). Democracy, Political Instability, and Government Tax Effort in Hydrocarbon-Dependent Countries. *Resources Policy*, 65(11), 101–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101530>
- Gallier, C. (2020). Democracy and Compliance in Public Goods Games. *European Economic Review*, 121, 103–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.103346>
- John, P., & Sjoberg, F. M. (2020). Partisan Responses to Democracy Promotion—Estimating the Causal Effect of a Civic Information Portal. *World Development*, 130, 104–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104914>
- Mas'ood, M. (2002). Peran Civil Society Sebagai Mitra Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Good Governance. *Jogjakarta: PKPEK Dan Forkoma MAP-UGM*.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmatulloh, R. (2013). Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sager, F. (2018). Policy Evaluation and Democracy: Do they Fit? *Evaluation and Program Planning*, 69, 125–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.08.004>
- Sandy, T. R. (2018). *Menurunnya Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)*. <https://doi.org/https://doi.org/http://digilib.unila.ac.id/33222>
- Serek, J., & Lomicova, L. (2020). Adolescents Transitions Between Different Views on Democracy: Examining Individuallevel Moderators. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 66(March), 101–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101104>
- Sorensen, G. (1993). *Democracy and Democratization, Process, and Prospect in a Changing World*. Oxford: Westview Press Inc.
- Stutzer, A., Baltensperger, M., & Meier, A. N. (2019). Overstrained Citizens? The Number of Ballot Propositions and The Quality of The Decision Process in Direct Democracy. *European Journal of Political Economy*, 59(5), 483–500. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.05.008>
- Zaini, M. (2019). Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 25(1), 54–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.33503/paradigma.v25i1.484>